

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SARJANA MENDIDIK DAERAH
TERLUAR TERTINGGAL DAN TERDEPAN (SM3T) DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI MALUKU**

Syahril
NPP. 30.1406
Asdaf Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Program Studi Kebijakan Publik

Email: syahrilsyahputra15@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Daerah 3T memiliki mutu pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan kekurangan tenaga pendidik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat kebijakan program sarjana mendidik di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) yang bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan tenaga pendidik. Penelitian ini memiliki **Tujuan:** untuk mengetahui implementasi kebijakan program sarjana mendidik di daerah terluar, tertinggal dan terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan, faktor penghambat serta upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum berjalan dengan optimal karena jarak ke lokasi sekolah yang jauh, transportasi umum yang kurang memadai, tidak tersedia akses internet yang baik, jumlah sarjana mengajar yang sedikit, program SM3T yang hanya berlangsung selama 1 tahun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan juga letak geografis yang kurang mendukung. **Kesimpulan:** Oleh karena itu Pemerintah Daerah Setempat perlu menambah bantuan sarana prasarana pendidikan yang memadai, melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat di pelosok daerah dan juga melakukan penambahan serta perpanjangan durasi mengajar guru kontrak.

Kata Kunci: SM3T, Mutu Pendidikan, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The 3T areas have a low quality of education. This is due to the problem of a shortage of educators. For this reason, the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia made a policy for undergraduate programs to educate in the outermost, disadvantaged, and foremost areas (SM3T) which aim to resolve the shortage of educators. This research has a **Purpose:** to find out the implementation of educational undergraduate program policies in the outermost, lagging, and leading areas in improving the quality of education, inhibiting factors and, government efforts to overcome obstacles in the Tanimbar Islands Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach using data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation related to research. **Results:** The results of the study show that the implementation of the undergraduate program policy educating the outermost, underdeveloped, and frontier areas in improving the quality of education in the Tanimbar Islands Regency has not run optimally due to the distance to the remote school location, inadequate public transportation, unavailable internet access well, the number of teaching undergraduates is small, the SM3T program only lasts for 1 year, low community participation in education, and also unfavorable geographical location. **Conclusion:** Therefore, the Local Regional Government needs to increase the assistance of adequate educational infrastructure, conduct outreach regarding the importance of education for people in remote areas, and also add and extend the duration of teaching contract teachers.

Keywords: SM3T, Quality Education, Policy Implementation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini kemudian dilandaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Budi, 2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi tersebut jelas membuktikan bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat karena dengan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pilar utama bangsa untuk bersaing dalam era global saat ini. Tujuan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah untuk

mencetak generasi muda bangsa Indonesia yang mampu menjaga kelanjutan pembangunan nasional di segala bidang menuju tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera serta untuk mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia di masa mendatang. Tidak hanya menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, setiap warga negara Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu pemerintah wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kewajiban pemerintah ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Beberapa standar yang digunakan untuk proses layanan penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam pasal 2 adalah 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Salah satu standar dalam mutu pelayanan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dalam hal ini guru/dosen adalah sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali baik di perkotaan maupun di pedesaan bahkan sampai dengan daerah perbatasan atau daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan).

Daerah 3T merupakan daerah yang tergolong terluar, tertinggal, dan terdepan atau berada pada daerah perbatasan terluar wilayah Indonesia. Maksud dari tertinggal yakni memiliki kualitas pembangunan yang rendah, masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan masyarakat daerah lain dalam skala nasional. Kemudian jika dilihat dari segi letak geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Wilayah 3T tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan yang tidak merata dan digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih membutuhkan bantuan dalam berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T dengan penetapan kriteria yakni: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Daerah 3T menjadi garda terdepan dalam ketahanan dan keamanan nasional karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu pendidikan di daerah 3T menjadi tolak ukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari tiap generasi dalam pemerataan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria dari daerah 3T menjadi pokok permasalahan dalam ketahanan dan keamanan nasional yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T. Kriteria permasalahan lain terkait aksesibilitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan bagi semua masyarakat 3T seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Faktor utama yang menghambat peningkatan mutu pendidikan adalah kurangnya tenaga pendidik.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah dan pemerataan guru di daerah 3T yaitu dengan melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T). Namun, upaya ini tampak masih kurang optimal sehingga menjadikan mutu pendidikan di daerah 3T semakin terpuruk ditengah-tengah kemajuan pembangunan nasional dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Hal ini tentu menjadi masalah bagi daerah 3T karena dapat menghambat proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor, membangun kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perlindungan dan ketertiban seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang diperoleh oleh masyarakat (Tommy et al., 2018).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah dan pemerataan guru di daerah 3T yaitu dengan melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T). Namun, upaya ini tampak masih kurang optimal sehingga menjadikan mutu pendidikan di daerah 3T semakin terpuruk ditengah-tengah kemajuan pembangunan nasional dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Hal ini tentu menjadi masalah bagi daerah 3T karena dapat menghambat proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk pemerataan dan percepatan pembangunan dari berbagai sektor, membangun kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perlindungan dan ketertiban seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) antara lain yang terkait dengan pendidik, seperti kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*mismatched*), angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang diperoleh oleh masyarakat (Tommy et al., 2018).

Mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Kebijakan Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, salah satu programnya adalah Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T). Program SM3T sebagai salah satu Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia ditujukan kepada Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, untuk ditugaskan selama satu tahun pada daerah 3T. Program SM3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mengatasi ketertinggalan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia di daerah 3T.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, yang pertama penelitian Muhammad Tommy (2018) yang berfokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T di Kabupaten Mahakam Hulu dengan Metode penelitian bersifat *Research and Development* (R&D). Hasil penelitiannya adalah dengan memiliki faktor pendukung sarana dan prasarana yang baik maka dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah akan meningkat minimal setara dengan tingkatan pendidikan di kota selain itu harus ada tingkatan kreatifitas profesional guru dengan mengajar beberapa metode baru sehingga bisa mendorong peserta didik untuk dapat melaksanakannya dengan baik, kualitas proses pembelajaran yang terbentuk memiliki indikasi standar kelulusan yang lebih maksimal. Penelitian yang kedua, Agus Dudung (2018) yang berfokus pada Model Pendidikan Daerah 3T Berbasis Kearifan Lokal dengan Metode Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Model penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dengan mengacu kearifan lokal yang mengutamakan prinsip “ASICT” yang dapat berkembang untuk mempercepat dan meningkatkan capaian kualitas pendidikan. Penelitian yang ketiga, Zulkifli Matondang dan Sanusi Hasibuan (2016) yang berfokus pada Evaluasi Pelaksanaan Program SM3T Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Simelue – NAD dengan Metode Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya adalah Program SM3T bertujuan dalam mengatasi masalah pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik juga memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T, 3) Jumlah pendaftar program SM3T 1379, lolos seleksi berkas 1343, hadir mengikuti ujian tulis 1016. Diumumkan yang diterima 250 orang dan cadangan 35 orang, 4) Persentase peserta yang mampu mengikuti program SM3T di daerah sasaran (Kab. Simeulue) mencapai 97,60% (244 orang), dan 5) Program SM3T berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T dan angka partisipasi sekolah di daerah sasaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti yakni Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku belum berjalan dengan optimal. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan menggunakan 2 variabel penelitian yang bersifat deskriptif. Teori implementasi yang digunakan adalah teori Implementasi Grindle dengan lokus penelitian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta factor yang menghambat dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Program SM3T.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif untuk memanifestasikan keadaan sebenarnya dan sifatnya yang aktual pada saat penelitian dengan cara mendapatkan informasi, mengumpulkan data serta menganalisis informasi yang tersedia untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Metode kualitatif adalah metode dalam penelitian yang hasil penelitiannya tidak menghasilkan data statistik atau angka-angka. Selanjutnya, pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan dalam memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang ingin diteliti dengan sampel atau data yang telah terkumpul dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan tanpa adanya analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku umum. Mendukung penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif sebagaimana yang dinyatakan oleh Creswell "*The process of qualitative research is largely inductive, with the inquirer generating meaning from the data collected in the field*". Penelitian dengan metode kualitatif melakukan pendekatan induktif yang berawal dari penyusunan argumentasi umum dari data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian adalah sebuah alat dalam mengumpulkan data di lapangan. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer yaitu dengan observasi dan wawancara serta pengumpulan data sekunder dengan dokumentasi. Peneliti selanjutnya melakukan Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan beberapa indikator dari dimensi teori Grindle untuk menganalisis penelitian ini.

1. Isi Kebijakan (*Policy Content*)

Pada dimensi isi kebijakan terdapat 6 indikator yang akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut:

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Hasil observasi dilapangan terkait program sarjana SM3T peneliti mengamati bahwa untuk mempermudah dan memperlancar terlaksananya program SM3T ini maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menentukan lokasi tempat tinggal dari para sarjana SM3T yang terdekat dengan sekolah dan juga menetapkan sasaran sekolah yang tepat sesuai prioritas sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesulitan akses ke lokasi mengajar bagi sarjana SM3T dan mendapatkan sekolah yang tepat sasaran dalam implementasi kebijakan program SM3T. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena kepentingan sarjana SM3T dalam mengajar masih terhambat oleh lokasi sekolah yang jauh dan transportasi yang kurang memadai.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam indikator hasil manfaat dalam Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah cukup baik, akan tetapi belum tercapai secara optimal dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai seperti komputer dan akses internet yang lancar untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena siswa/siswi dan tenaga pendidik belum bisa mengakses jaringan internet dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Hasil pengamatan peneliti, Derajat perubahan yang terjadi dari implementasi kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan masih kurang optimal karena masih ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarjana program SM3T ini dan juga dukungan dan fasilitas seperti buku-buku literatur mata pelajaran yang belum memadai. Kesulitan akses pendidikan di daerah 3T seperti jarak yang begitu jauh membuat proses distribusi bahan ajar dan fasilitas pendidikan lain belum memadai sehingga dengan pelaksanaan dari program SM3T ini juga menjadi terhambat. Dari hasil wawancara dan observasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya perubahan ke arah lebih baik dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan juga harus mendapat dukungan dari sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena belum semua sekolah memiliki sarjana program SM3T dalam mengajar di kelas.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tugas sekolah yang menjadi sasaran dari program SM3T adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi sarjana program SM3T ini untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T merupakan amanat langsung dari Presiden Indonesia. Kemudian, untuk mencapai tujuan keberhasilan kebijakan ini harus ada dukungan dari Dinas Pendidikan Daerah, Sekolah dan juga masyarakat setempat. Hasil pengamatan peneliti, kerjasama dalam pengambilan keputusan sudah dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan sudah berjalan dengan optimal karena kedudukan, fungsi dan tugas dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berjalan dengan baik.

e. Siapa Pelaksana Program

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan sarjana program SM3T tidak memiliki transportasi pribadi mengingat bahwa mereka adalah sarjana yang berasal dari kota besar dan di luar pulau dengan lama program hanya 1 tahun sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana program sudah cukup baik akan tetapi jumlah sarana transportasi umum seperti mobil angkutan dan kendaraan pribadi kurang memadai dan lama program hanya 1 tahun membuat pelaksana program SM3T ini kurang optimal dalam memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena program SM3T hanya berlangsung selama 1 tahun.

f. Sumber daya yang terlibat

Berdasarkan hasil observasi peneliti kekurangan guru di sekolah SMA Negeri 1 Tanimbar Utara memang menjadi hambatan bagi siswa/siswi yang ada karena mereka tidak bisa menerima pelajaran langsung dari tenaga pendidikan yang kompeten. Untuk itu adanya program SM3T sangat membantu mengingat mereka bisa memberikan pengajaran untuk mata pelajaran yang tidak ada guru pengampu untuk mata pelajaran seperti ekonomi dan bahasa inggris. Dengan adanya bantuan ini maka sekolah merasa terbantu dan dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena rendahnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

2. Konteks Kebijakan (Policy Context):

Konteks kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun dalam sebuah lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Ada banyak kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepentingan umum atau publik yang harus menjadi prioritas dari Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memaksimalkan implementasi kebijakan program SM3T agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan sudah berjalan dengan optimal karena strategi dari dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memprioritaskan layanan kebutuhan sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berupaya untuk memaksimalkan layanan penyelenggaraan pendidikan dan turut mendukung adanya implementasi kebijakan program SM3T. Meskipun program ini adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T, tapi letak geografis dan lokasi yang jauh dari pusat kota juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan SM3T di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti proses distribusi sarana prasarana dan penunjang lain seperti alat tulis menulis dan buku literatur yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Proses distribusi yang membutuhkan waktu yang lama seperti kapal laut membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sampai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proses distribusi ini belum termasuk lama proses distribusi yang harus dilakukan antar kecamatan yang berbeda pulau dalam 1 kabupaten. Untuk itu dibutuhkan karakteristik penguasa yang tanggap dan mampu memberikan keputusan yang tepat dan dapat diterapkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar lebih optimal. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan belum berjalan dengan optimal karena kondisi dan karakteristik geografis daerah yang berbentuk kepulauan menghambat proses distribusi sarana prasarana pendidikan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan dan sasaran dari kebijakan ini sudah cukup baik, walaupun masih keterbatasan fasilitas yang kurang memadai dan lokasi terpencil membuat proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan tetapi para sarjana SM3T sudah berupaya secara maksimal untuk mengajar. Pada indikator penelitian ini, peneliti simpulkan sudah berjalan dengan optimal karena sarjana program SM3T telah mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat dengan mengajar di daerah 3T.

3.2 Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan

Pelaksanaan kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum dapat berjalan optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yakni tenaga pendidik yang kurang kompeten. Berdasarkan pengamatan peneliti, Jumlah guru tetap masih kurang dan tenaga kontrak yang mengajar memiliki waktu yang mengajar yang tidak pasti dan tidak masuk ke kelas tiap saat untuk mengajar, ditambah masih banyak guru hanya lulusan SMA yang masih jauh dari harapan untuk menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah dengan baik. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan lebih lanjut. Banyak masyarakat yang masih berpikiran tidak terbuka menjadi sebuah hambatan untuk melaksanakan kebijakan ini, Seperti kurangnya dukungan orang tua untuk mendorong anaknya bersekolah bahkan diantara mereka lebih memilih membantu orang tua mereka untuk berkebun, bertani dan ke laut untuk mencari ikan dibandingkan mereka bersekolah tiap paginya.

2. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan yang memadai

Kebijakan program SM3T dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum dapat berjalan optimal karena kurangnya fasilitas pendukung dalam proses penyelenggaraan pendidikan seperti kesulitan dalam mengakses informasi di internet terkait pelajaran sekolah, keterbatasan penggunaan alat komunikasi untuk mendapatkan sinyal telekomunikasi. Hal ini tentu menghambat koordinasi antar sarjana program SM3T dengan pihak-pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk memberikan informasi terkait proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kekurangan buku dan bahan ajar yang digunakan juga masih belum memadai seperti kekurangan buku literatur terbaru untuk mata pelajaran sekolah. Kemudian, fasilitas transportasi publik yang tidak memadai untuk para sarjana program SM3T dan aliran listrik yang masih 12 jam. Hal ini membuat pelayanan pendidikan menjadi kurang optimal jika mengimplementasikan program SM3T.

3. Letak geografis dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung

Kenyataan yang kurang mendukung terkait proses pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah lokasi yang begitu jauh dari pusat kota dan secara geografis berbentuk kepulauan sehingga hal ini membuat proses distribusi sarana prasarana dan fasilitas pendidikan menjadi terhambat dan mengalami kesulitan dalam penyebaran distribusi alat tulis menulis dan fasilitas

pendidikan secara merata. Kesulitan ini tentu dialami oleh hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hambatan ini juga dirasakan langsung oleh sarjana program SM3T dalam menempuh lokasi sekolah yang jauh di pedalaman. Implementasi kebijakan program SM3T tentu saja belum berjalan dengan optimal dikarenakan situasi dan kondisi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah 3T. Kehidupan sosial dan kemampuan ekonomi juga berpengaruh pada kesempatan mengenyam pendidikan dimana orang tua tidak mendukung anaknya untuk bersekolah bahkan anak-anak mereka ikut untuk membantu mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan mencari hasil laut.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. Meningkatkan jumlah dan memperpanjang SK pegawai kontrak tenaga pendidik P3K
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melalui kebijakan Bupati Kepulauan Tanimbar memperpanjang Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru kontrak daerah yang bertujuan untuk membantu dan ikut andil dalam percepatan pembangunan pendidikan di Kepulauan Tanimbar. Dengan adanya penambahan dan perpanjangan SK tenaga pendidik kontrak nantinya mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pendidikan yakni pihak sekolah dan sarjana program SM3T yang sedang membantu dalam memberikan pelayanan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. Membangun sarana dan prasarana pendidikan
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui penggunaan APBD berusaha memaksimalkan anggaran dalam menyediakan sarana dan membangun prasarana dan fasilitas pendidikan. Seperti menyediakan Wi-Fi gratis di sekolah-sekolah guna menunjang proses belajar mengajar yang kemudian akan digunakan oleh guru dan siswa dalam mengakses sumber informasi dan literatur secara online di internet. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga memberikan bantuan seperti 1 genset tiap sekolah di daerah pedalaman kecamatan untuk mengalirkan listrik pada saat proses belajar mengajar. Mengingat sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hanya memiliki aliran listrik 12 jam yaitu pada jam 6 sore sampai 6 pagi sehingga pada saat proses belajar mengajar tentu menghambat proses belajar di sekolah. Pemerintah juga telah membangun infrastruktur telekomunikasi yaitu 22 tower sinyal BTS (Base Transceiver Station) untuk proses kelancaran komunikasi nirkabel guna memperlancar proses penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat terkait pentingnya pendidikan
Upaya sosialisasi yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun oleh pemerintah daerah adalah wujud nyata kepedulian sekaligus upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mampu memotivasi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Pemahaman dan dukungan orang tua kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan harapannya dapat memberikan peningkatan jumlah anak-anak yang bersekolah di setiap jenjang pendidikan. Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat Tanimbar juga berpengaruh terhadap proses melanjutkan pendidikan lebih lanjut bagi anak-anak mereka juga. Mereka menganggap bahwa sekolah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mengenyam pendidikan. Pada akhirnya mereka menyuruh anak-anak mereka juga untuk bertani dan berkebun dan berjualan hasil kebun mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan upaya

kegiatan sosialisasi dan pendekatan terkait pentingnya pendidikan sehingga kedepannya harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi lebih baik.

3.4 Diskusi temuan utama penelitian

Implementasi kebijakan sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum secara optimal terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi kebijakan, dimana dari 6 indikator yang ada terdapat 5 indikator yang belum berjalan dengan optimal dan 1 indikator yang sudah berjalan dengan optimal. Sedangkan pada dimensi lingkungan kebijakan, dimana dari 3 indikator yang ada, terdapat 2 indikator yang sudah berjalan dengan optimal dan 1 indikator yang belum berjalan dengan optimal. Fenomena ini terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan; Kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai; Letak geografis dan kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Berikut temuan-temuan yang peneliti dapatkan dalam penelitian yang berbeda dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, antara lain:

1. Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2. Data peserta didik berdasarkan jenis kelamin pada jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3. Data jumlah guru PNS aktif mengajar berdasarkan jenis kelamin pada jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
4. Data jumlah guru P3K dan SM3T pada jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
5. Data ruang kelas dan meja/kursi jenjang sekolah dasar
6. Data Durasi Aliran Listrik Wilayah dan Transportasi Umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang memiliki 2 dimensi sebagaimana berikut:

1. Dimensi Isi Kebijakan (Policy Content) belum optimal karena yang pertama, kepentingan sarjana program SM3T dalam mengajar masih terhambat oleh lokasi sekolah yang jauh dan transportasi yang kurang memadai. Kedua, siswa/siswi dan tenaga pendidik belum bisa mengakses jaringan internet dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas. Ketiga, belum semua sekolah memiliki sarjana program SM3T dalam mengajar di kelas. Keempat, pelaksanaan program SM3T hanya berlangsung selama 1 tahun. Kelima, rendahnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
2. Dimensi Lingkungan Kebijakan (Policy Context) sudah berlangsung dengan cukup baik, namun masih ada indikator yang belum optimal seperti kondisi dan karakteristik geografis daerah yang berbentuk kepulauan menghambat proses distribusi sarana prasarana pendidikan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, biaya dan lokasi penelitian. Penelitian hanya dilaksanakan selama dua minggu. Kemudian, peneliti memiliki keterbatasan biaya dan juga lokasi penelitian yang berbentuk kepulauan serta akses sarana transportasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam pada lokasi penelitian terkait Implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan informasi terkait segala kebutuhan penelitian yang peneliti lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh informan yang bersedia diwawancarai dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dudung, A. (2018). Model Pendidikan Daerah 3T Berbasis Kearifan Lokal

Matondang, Z. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program SM3T Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Simelue – NAD

Tommy, M. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T di Kabupaten Mahakam Hulu

